

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan di masa sekarang memberikan dampak yang kuat pada semua bidang kehidupan. Selain perkembangan zaman yang mempengaruhi sisi spiritual, juga mempengaruhi sisi moral. Kemudahan akses berbagai informasi berdampak pada perilaku tidak etis masyarakat Indonesia. Selain itu, pendidikan sangat berperan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, meningkatkan kehidupan masyarakat sebagai keseimbangan hidup, serta merupakan hal yang penting untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan.

Pendidikan merupakan aspek yang diharapkan dapat menghasilkan generasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Pendidikan dipahami sebagai rangkaian usaha koperasi untuk mengenali kualitas anggotanya, sehingga menjadi manusia yang dewasa (Arif Rohman, 2009: 2). Kematangan ini merupakan prasyarat bagi berkembangnya potensi individu yang meliputi dimensi individualitas, sosialisasi, rasionalitas, religiusitas, dan moralitas.

Dalam melaksanakan tatanan kehidupan yang tepat dengan cita-cita bangsa dan dalam memelihara dan mempertahankan sistem nilai yang berlaku, pendidikan berhasil bila didukung oleh banyak aspek lain, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Perkembangan zaman global saat ini mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Abdullah Idi (2011: 208) menjelaskan perubahan sosial dari segi struktur, budaya dan berbagai perubahan dalam kehidupan sosial yang mengarah pada keseimbangan sistem sosial.

Pendidikan adalah upaya dalam memanusiakan manusia atau membantu mereka memahami diri sendiri sesuai dengan harkat dan martabatnya (Taufik, 2019). Pendidikan bisa mempengaruhi tumbuh kembang seseorang dalam segala bidang kehidupan, hal itu memiliki kekuatan atau efek yang dinamis pada kehidupan di masa depan. Selanjutnya pendidikan juga bisa secara optimal memajukan banyak potensinya, yaitu pengembangan potensi secara social, intelektual, fisik, emosional serta spiritual yang setinggi-tingginya dari individu tepat pada tingkat tumbuh kembang, pola pikir dan lingkungan sosial budaya di mana tempat ia tinggal.

Pendidikan juga merupakan bentuk usaha awal untuk memperoleh peserta didik yang siap untuk perannya di hari mendatang melalui pengelolaan, pembelajaran dan kegiatan pendidikan (UU SPN No. 20 Tahun 2003). Pendidikan dipandang sebagai proses memanusiakan manusia, dan peran lembaga pendidikan sebagai agen perubahan sangat tepat. Namun, sejauh ini, itu hanya berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Hanya pada tingkat kognitif. Sayangnya, perubahan kognitif ini tidak diikuti oleh kecerdasan lain untuk mengkompensasi, yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan religius. Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk tingkat laku anak.

Sebagai tempat humanisasi dan pengembangan diri, sekolah seharusnya menjadi wahana dalam menjalin interaksi sosial yang baik. Ruang-ruang tersebut diharapkan nantinya bisa mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Perbedaan tingkah laku siswa didasarkan pada tiga hal yang berbeda, antara lain berdasarkan lingkungan, interaksi sosial dan seleksi (Brandén et al. 2018). Pola interaksi yang

mereka bangun saat menyampaikan pesan membentuk gambaran karakter orang tersebut (Lerner, 2018).

Ada beberapa interaksi pada perilaku negatif, termasuk *bullying*. *Bullying* ini dipengaruhi oleh nilai teman (Dijkstra, dkk. 2008). Beberapa kasus kenakalan remaja di sekolah antara lain tawuran, menyontek saat ujian (curang), kekerasan antar anak dan *bullying*. Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 mengenai hak dan tanggung jawab anak, yang menyatakan bahwasannya setiap anak punya hak untuk hidup secara adil, tumbuh berkembang dan berperan serta sesuai pada martabat kemanusiaan yang berlaku.

Pengalaman kekerasan (*bullying*) masa kanak-kanak merupakan perlakuan yang memiliki efek dalam jangka panjang dan tidak akan bisa terhapus dari pikiran korban. Menurut Suyanto (2010: 102), dampak kekerasan pada anak biasanya dapat bermanifestasi sebagai masalah psikologis, kurangnya motivasi, mimpi buruk dan kekerasan terhadap anak, atau juga mengakibatkan kematian korban. Menurut Huraarah (2012: 49), menjelaskan bahwa korban *bullying* cenderung memiliki ciri-ciri bermula dari keluarganya yang *broken home* (orang tua bercerai) ataupun keluarganya yang menikah muda sehingga menimbulkan pemikiran yang masih belum dewasa secara batin.

Korban *bullying* biasanya ialah anak pendiam ataupun anak yang bermasalah dengan temannya. *Bullying* disebabkan oleh beberapa penyebabnya seperti: perbedaan agama, ekonomi, jenis kelamin, tradisi dan kebiasaan menghukum teman yang berusia dibawah usia pelaku. Ada rasa dendam atau cemburu, ada nafsu menguasai korban melalui kekerasan fisik dan ketertarikan

pada seks. Pelaku berbuat *bullying* biasanya juga untuk menaikkan ketenarannya di kalangan teman sebayanya. *Bullying* di negara kita sendiri bukanlah kejadian baru bahkan sudah pernah terjadi dari jaman nenek moyang. *Bullying* adalah keinginan untuk menyakiti, yang diterjemahkan menjadi tindakan yang menyebabkan penderitaan pada orang lain. Perbuatan ini dilakukan oleh orang yang lebih kuat secara langsung. (Astuti, 2008: 3).

Ketidaksepakatan antara kelompok yang menerima dan menolak intimidasi mungkin karena kepercayaan terhadap perilaku ini (Lansu, et al. 2013). Interaksi yang negatif dapat membuat karakter yang muncul di antara siswa menyimpang dari tujuan sekolah (Aldridge & Ala'I, 2013). Hubungan yang buruk menjadi berbahaya apabila dibiarkan begitu saja dan bisa menjadi hal yang biasa di kalangan siswa.

Penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2015, oleh NGO *Plan International* dan *International Center for Research on Women (ICRW)*, memperlihatkan ada hingga 84 persen anak Indonesia yang pernah merasakan tindak kekerasan di sekolah (Eliasa, 2017). Siswa melakukan kejahatan berupa *bullying*, tawuran, membentak teman, membolos dan mencoret-coret dinding ruang kelas atau lingkungan sekitaran sekolah (Chan et al., 2013; Fung et al., 2015).

Terhadap 137 siswa di India, menemukan bahwa menemukan bahwa 45 murid laki-laki dan 20 murid perempuan menjadi pengganggu teman-teman sekolahnya dengan perilaku mengejek, membully dan kekerasan (Malik, A. 2018). Selanjutnya penelitian Rana et all (2020) terhadap 667 siswa sekolah negeri dan swasta di India Utara, menunjukkan bahwa Prevalensi segala jenis *Bullying* adalah

25,6% (16% viktimisasi, 5,2% melakukan, dan 4,3% menjadi korban bully). *Bullying* verbal adalah yang paling umum (55,1%), diikuti oleh *Bullying* fisik (32,7%) dan relasional (25,2%). Prevalensi cyber*Bullying* adalah 2,7%. Sekitar 44% siswa melaporkan bahwa orang dewasa (guru dan pihak manajemen di sekolah) tidak pernah melakukan apa pun untuk menghentikan *Bullying*.

Selain itu, Thakkar Niharika (2021) melakukan penelitian yang melakukan tinjauan sistematis literatur India tentang intimidasi dan viktimisasi sekolah tradisional. Kajian tersebut mencakup 37 studi. Untuk setiap studi yang disertakan, rincian berikut ditinjau: (a) fitur metodologis, (b) perkiraan prevalensi *bullying*, (c) bentuk *bullying*, (d) faktor risiko dan (e) konsekuensi dari *bullying*. *Bullying* telah ditemukan terjadi di India dan beberapa faktor risiko *bullying* dan viktimisasi di India khusus untuk konteks India. Selain itu, intimidasi di India memiliki konsekuensi yang menghancurkan baik bagi pelaku maupun korbannya.

Hildago dkk. (2021) melakukan penelitian terhadap 384 siswa di kota Talcoban di Filipina dan menemukan bahwa sikap intimidasi siswa secara signifikan terkait dengan ukuran keluarga inti dan tingkat pendidikan orang tua mereka. Ternyata *bullying* terhadap siswa di sekolah-sekolah di wilayah studi terus berlanjut meski program pendampingan telah dilaksanakan. Selain itu, Irene M. Daguasi (2020) menemukan bahwa *bullying* adalah masalah yang sulit di sekolah dan bahkan di komunitas di seluruh dunia karena dampaknya yang berbahaya bagi korban dan pelaku intimidasi.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk menguji komitmen pemangku kepentingan dari masing-masing sekolah terhadap peran dan tanggung

jawab yang diberikan dalam mengimplementasikan aturan dan peraturan Undang-Undang Anti-Bullying 2013. Selain itu, ini menyajikan sekolah dan program anti-bullying yang disetujui dan dibuat oleh sekolah. efektivitasnya dalam mengurangi bullying di sekolah. Rekomendasi yang diberikan dapat mendorong kerjasama antara Kemendikbud dan pemangku kepentingan untuk mencegah dan menghentikan bullying di sekolah. Di Filipina, Departemen Pendidikan melaporkan bahwa 80% dari 1.456 kasus pelecehan anak di sekolah pada tahun 2019–2020 terkait dengan intimidasi (Malipot, 2021). Perwakilan Cebu Gerald Anthony Gullas Jr. melaporkan bahwa total 6.363 kasus bullying tercatat di SD, SMP dan SMA sederajat. Untuk jumlah hari mengajar (201), jumlah kejadian perundungan yang tercatat adalah 31 per hari.

Di kedua negara tersebut (India dan Filipina) juga banyak terjadi kekerasan di india. Informasi kasus pelecehan yang terjalin pada tahun 2021, berdasarkan pada data-data yang dijalankan oleh KPAI pada tanggal 2 Januari - 27 Desember 2021 yaitu kasus-kasus di mana seorang siswa bergumul dengan detail mendominasi, kekerasan SARA ada 1 kasus, bullying ada 6 kasus, dan tawuran antar pelajar ada 10 kasus (<https://kumpuran.com/> diunduh pada 12 Februari 2022).

Paparan kekerasan sangat membebani kehidupan anak atau siswa, sehingga sekolah perlu menilai kondisi mental setiap siswa. Dalam UU Perlindungan Anak, penanganan kesehatan anak dengan menyeluruh dilakukan melalui rehabilitasi, promosi, dan pengobatan. Seiring dengan maraknya fenomena bullying, ini menjadi peluang untuk mengimplementasikan Pasal 44.

Direktur Kemendikbud Ristek Sri Wahyuningsih menegaskan, “Mendikbud menjelaskan, dunia pendidikan dibayangi oleh tiga dosa besar yaitu intoleransi dan radikalisme, kekerasan seksual dan *bullying*. Agar pembelajaran menjadi aman, menyenangkan dan menyenangkan, maka harus dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Psikolog Trisa Genia C. Zega, M.Psi mendefinisikan *Bullying* sebagai pengaruh besar dalam menghancurkan masa depan bagi korbannya. Saat ini ada hubungan dan pergaulan manusia di lingkungan, sehingga ada kemungkinan terjadinya perundungan.” katanya diwebinar Rise Against *Bullying* (RISING) 2021 bertajuk “Say No to *Bullying*” yang dibuat oleh Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) pada hari Jumat, 19 November 2021. Beliau mengatakan ada 40 persen anak Indonesia yang meninggal dunia, karena bunuh diri. 38.41 persen mengatakan pernah menjadi pelaku, sedangkan 45.35 persen adalah korban. Ada bentuk-bentuk *bully* yang sangat sering terjadi, kata Trisa, yakni; *denigration* seperti pencemaran nama baik atau fitnah, *exclusion* seperti pengucilan kawan dan *harassment* seperti berkata kasar atau seperti teror pesan beruntun.

Selanjutnya dari data tentang kasus-kasus *Bullying* di Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut; Jumlah SMK di Langkat adalah 72 SMK terdiri dari 3 SMK Negeri dan 69 SMK Swasta. Terdapat 40-60 kasus kekerasan pertahun diantaranya; *Bullying*, cacat fisik, body shaming dan kemiskinan. Untuk data kasus *Bullying* di SMK Langkat diperoleh dari Guru BK ada sekitar 40 sampai 60 kasus pertahunnya. Dari sekian banyak kasus, *bullying* terhadap siswa secara fisik, materi, kurang lancar atau bodoh adalah yang paling dominan. Karena fenomena perundungan

semakin marak, hal ini merupakan peluang untuk menerapkan Pasal 44. Perundungan ini disebabkan oleh hal sepele, yaitu korban tidak mau membagi ayunannya. Setelah dibully, korban tidak mau sekolah bahkan meminta untuk pindah sekolah.

KPAI menyebutkan, dalam waktu sembilan tahun antara 2011 hingga 2019 terdapat 37.381 aduan kekerasan terhadap anak. Jumlah pengaduan baik perundungan di bidang pendidikan maupun media sosial sebanyak 2.473 aduan (<https://www.kpai.go.id>). Untuk wilayah di Kabupaten Langkat kasus *Bullying* di SMK sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 terdapat 40-60 kasus. *Bullying* yang terjadi seperti *body shaming*, status sosial dan ekonomi. Kasus baru juga terjadi di salah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta Kabupaten Langkat, terjadi pada seseorang anak yang terlahir katai/kerdil dengan tinggi badan 130 cm, setiap harinya siswa tersebut sering di *bully* dan olok-olok teman-temannya hingga siswa tersebut tidak mau pergi kesekolah. Anak-anak yang memiliki bibir sumbing sehingga suaranya sengau dan bicaranya tidak terlalu jelas juga di-bully oleh anak sekolah. Pada tahun pelajaran 2021/2022, terjadi dua kejadian di sebuah SMK Negeri di Kabupaten Langkat, dimana siswa kurang mampu secara ekonomi diejek oleh teman sekelasnya karena seragam sekolahnya kotor dan tasnya tidak bisa disegel. *Bullying* terhadap anak pemulung/pencari permukiman kumuh juga terjadi di sebuah SMK di negara bagian Kabupaten Langkat. Perundungan juga terjadi, yang juga sering terjadi pada siswa yang terlambat membayar uang sekolah.

Selain itu, dari hasil studi pendahuluan peneliti SMK Swasta Satria Bingai Namo Ukur Langkat, ada beberapa siswa yang menyukai *bullying* dari hasil

wawancara yang dibuat dengan siswa dikelas X, dan diantara perilaku *bullying* tersebut berupa ejekan. Ada seorang siswa yang seringkali memanggil temannya tersebut dengan nama orang tuanya, atau semula kasar kepada temannya yang berujung pertengkaran, mendorong kursi teman dengan sengaja hingga jatuh.

Mengolok-olok nama orang tua menjadi salah satu bentuk *bullying* di SMK Swasta Satria Bingai Namo Ukur Langkat. Pelaku menyebut nama korban dengan panggilan lucu, membuat teman-teman yang lain mentertawakannya. Tujuannya adalah untuk membuat teman-teman lain menertawakan teman Anda. Bentuk *bullying* verbal lainnya ialah mengatakan hal-hal yang tidak sopan kepada teman, seperti *body shaming* misalnya seperti mengatakan bahwa temannya memiliki wajah yang jelek, berjerawat dan menjijikan.

Guru SMK Swasta Satria Bingai Namo Ukur Langkat juga menyatakan bahwa faktor senioritas juga terjadi pada dilakukan siswa kelas XII SMK kepada adik-adik kelasnya. Pelaku *bullying* adalah murid laki-laki dan perempuanlah yang seringkali menjadi korban. Namun bukan hanya siswa laki yang tidak suka dibully, siswa perempuan juga sering membully teman-temannya. Beberapa guru juga mengatakan banyak teman segender yang saling membully, seperti mengolok-olok faktor eksternal, perbedaan fisik seperti perbedaan warna kulit serta merasa lebih jago dari teman-temannya.

*Bullying* disebabkan oleh sikap siswa yang berkaitan dengan usia, sehingga murid lain tidak berani mendekati murid tersebut. Sekolah sebagai tempat sosialisasi mampu dengan cepat mempengaruhi lingkungan. KPAI mengancam bahwa *bullying* ialah kejahatan di lembaga pendidikan. Sebenarnya sekolah harus

menjadi wadah yang aman dan nyaman bagi semua pendidik. Lembaga pendidikan harus mengajarkan siswa perihal point dalam bermasyarakat dan penghormatan. Siswa harus diajarkan untuk berpikir dengan hati nurani yang tajam dan halus. KPAI membenci segala bentuk kekerasan.

KPAI juga mendukung Kemendikbud dan Kemenristekdikti untuk melakukan perubahan berupa pengawasan dan pertimbangan terhadap implementasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan di Satuan Pendidikan, karena berdasarkan hasil KPAI . Berdasarkan pantauan, ternyata di beberapa sekolah yang terjadi kasus kekerasan, sekolah tidak mengetahui adanya Permendikbud (<https://kumpuran.com/> diunduh pada 12 Februari 2022).

Pendidikan yang baik bertujuan untuk mendapatkan pengertian kepada siswa mengenai poin-poin yang berlaku sehingga dapat menciptakan kedamaian. Penting untuk mengembangkan pendidikan perdamaian untuk mengimplementasikan budaya damai di lingkungan sekolah. Di tingkat internasional, pendidikan juga bertujuan untuk meredam pertikaian, perbedaan dan kekerasan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui UNESCO dan UNICEF, telah menjadikan pendidikan perdamaian sebagai respon kemanusiaan pascakonflik untuk membangun kembali perilaku damai dalam masyarakat pascakonflik. Juga diyakini bahwa pendidikan, khususnya pendidikan perdamaian, memiliki kekuatan untuk melemahkan dan meminimalkan ekstremisme yang saat ini menyasar kaum muda yang tidak cukup terlatih dalam hal toleransi dan saling menghormati.

Pendidikan bukan sekedar membuat seseorang itu pintar, namun juga memiliki akhlak yang memungkinkan mereka memahami eksistensi sebagai anggota masyarakat untuk diri sendiri dan orang lain. Miklikowska (2010) menyatakan bahwa budaya damai dapat diciptakan melalui tiga hal, yakni: (1) mendukung konflik tanpa kekerasan seperti diskusi, penghindaran dan toleransi, (2) mencegah perilaku kekerasan, (3) mendorong kendali diri dalam pengendalian diri. Dengan menanamkan budaya damai, siswa diharapkan bisa menghargai orang lain dengan penuh toleransi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi negatif.

Menurut Achieving Peace, McGehee (2016) mengemukakan bahwa pelatihan soft skills dalam pendidikan perdamaian dapat mengurangi perilaku kekerasan. Program pelatihan soft skill untuk pendidikan perdamaian yang dirancang khusus untuk mengajar, membangun dan mengubah sikap atau perilaku di berbagai fungsi organisasi. Subramaniam, 2013, (dalam Nalini R. Chondekar, 2018), mahasiswa pada umumnya perlu melakukan persiapan dan pengembangan yang lebih komprehensif agar berhasil mentransfer perolehan pendidikan perdamaian. Oleh karena itu, program pelatihan pendidikan perdamaian disusun secara hati-hati dan dibuat dengan metode keilmiahan serta kemahiran yang diperlukan oleh organisasi masa sekarang dan masa mendatang, karena pembelajarn tersebut haruslah berrmanfaat dalam menambah keterampilan teknis, teoretis, dan konseptual. Sebagaimana dicatat oleh Heathfield (2008), pelatihan *soft skill* merupakan komponen penting untuk mencapai kinerja tinggi. Barbara Cimatti, (2015) beberapa topik yang dapat dibahas dalam pelatihan soft skills pendidikan

perdamaian: a). keterampilan komunikasi, b). keterampilan presentasi, c). pemecahan masalah, d). resolusi konflik, e). keterampilan manajerial, f). Kecerdasan emosional, g). manajemen waktu, h). etika, i). kerja kelompok, j). Kemampuan beradaptasi.

Dari kesepuluh topik di atas, peneliti memfokuskan pada resolusi konflik dengan topik baru, Pelatihan Pendidikan Perdamaian, yang juga mencakup beberapa topik. Soren, (2011) Pelatihan Pendidikan Perdamaian Meningkatkan Pemahaman dan Pemahaman Siswa tentang; A). Pendidikan harus tentang membangun pertahanan perdamaian dalam pikiran orang-orang dan hubungan perdamaian yang saling menguntungkan. Penting untuk mencapai tujuan kohesi sosial dan kebersamaan, dan beralih dari budaya intimidasi ke ketidaksepakatan ke budaya perdamaian. dan non-kekerasan; B). Menggarisbawahi perlunya membentuk program inti pendidikan perdamaian di semua bidang kurikulum sekolah; C). Menyadari pentingnya cita-cita kebanggaan seperti kebaikan, kasih sayang, persahabatan, kemurahan hati, kesetaraan dan kebenaran dalam semua agama mengarah pada kesimpulan bahwa langkah-langkah berikut membantu menanamkan nilai dan menambah sikap serta perilaku yang dipraktikkan untuk mencapai budaya damai dan tanpa kekerasan, cita-cita semua orang: Harmonisasi program pendidikan siswa memastikan bahwa *school bullying* dapat diatasi melalui program pendidikan perdamaian.

Wan-Azlinda dan Mohamed-Hafis, 2009, (dalam May Britt Postholm, 2018) ditemukan bahwa guru merasa sulit untuk menanamkan rasa cinta dan kasih sayang serta toleransi sosial pada siswa karena kurangnya pemahaman mereka

tentang pendidikan damai, yang menyebabkan *bullying* diperbolehkan di kalangan siswa. Bennett et al., 2000 (dalam Hassan, 2014) Sebagai model pelatihan pendidikan perdamaian terapan, hendaknya fokus pada manfaatnya dengan membantu peserta pelatihan dalam proses pembelajaran, memberikan kesempatan pengalaman praktis dan membimbing peserta untuk mengerti dan menerapkan hal baik dalam kehidupannya sehari-hari.

Memahami pendidikan perdamaian, siswa sangat penting untuk kehidupan manusia awal. Mengingat bahwa konflik adalah fakta kehidupan, itu tidak dapat dihindari. Bagaimana pendidikan sekolah dapat mengajarkan siswa untuk menghadapi konflik? Aspek pedagogik harus dikembangkan dalam mendukung tujuan dari sekolah guna menciptakan generasi yang terlibat aktif dalam membangun perdamaian. Aspek-aspek tersebut antara lain: (1) Kerja Sama (2) Saling Percaya (3) Penerimaan terhadap Perbedaan (4) Tenggang Rasa (5) Penghargaan Kelestarian terhadap Lingkungan (Hadjam. 2003; Sue McGregor, 2014). Pendidikan ialah proses yang berkesinambungan, maka pendidikan damai ini juga harus diajarkan di semua jenjang pendidikan. Tentunya pembelajaran damai harus kita sesuaikan dengan adanya perkembangan usia anak didik. Seluruh aspek pendidikan baik guru, kurikulum, pemerintah, siswa maupun masyarakat harus mendukung terwujudnya perdamaian.

Dalam kasus di atas, muncul masalah sosial yang jauh dari nilai pendidikan beradab dan psikologi sosial kewarganegaraan, karena individu tidak tahu bagaimana sikap saling menghargai dan menghormati. Berbagai program pemerintah untuk mengatasi masalah sosial tersebut menjadi tidak efektif karena

terfokus pada pemerintah (*top-down*), tanpa usaha dan partisipasi masyarakat, padahal program-program masalah sosial yang hanya dapat berfungsi secara baik jika didukung dengan pendekatan *top-down (bottom-up)* dalam bentuk gerakan sosialnya (Certoma & Notteboom, 2015).

Program pelatihan *Peace Education* juga melembagakan nilai-nilai sosial warga sehingga mereka sadar akan risiko masalah sosial yang mungkin terjadi. Pendidikan perdamaian dalam program ini adalah tentang membekali warga negara dengan pengetahuan dan keterampilan guna mengoptimalkan kecerdasan sosial mereka. Pendidikan perdamaian bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan warga dalam pencegahan dan penyelesaian masalah sosial seperti perundungan remaja.

Sekolah adalah gambaran masyarakat kecil. Ada individu dengan budaya dan karakter yang berbeda. Pada tahapan ini sangat tepat untuk mengenalkan dan mengamalkan banyak point yang membantu perbaikan. Oleh karena itu, dengan mengikuti pelatihan pendidikan perdamaian, siswa harus mengembangkan cara berpikir baru tentang nilai-nilai perdamaian.

Melalui pelatihan *Peace Education* akan melatih siswa untuk mengembangkan karakter yang baik dalam mengembangkan dan membangun sebuah masyarakat. Sikap tersebut antara lain yaitu: toleransi, empati, kejujuran, menghormati diri sendiri, tidak saling mencurigai, keadilan, persahabatan, saling pengertian, kerjasama, dan keadilan. Selain itu, dalam pelatihan *Peace Education* juga akan mengembangkan keterampilan-keterampilan, seperti: mampu memahami pemikiran yang berbeda, mendengarkan, berkomunikasi, mampu bekerjasama,

berpikir kritis, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, tanggungjawab social dan pemecahan masalah.

*Peace Education* adalah proyek pembelajaran yang mempromosikan dan melatih warga dunia yang baik. Alternatif harus mencakup pendidikan tentang penyebab kekerasan dan mendidik siswa tentang isu-isu kunci dalam pendidikan perdamaian, termasuk: membangun perdamaian itu sendiri, memelihara dan menciptakan.

Program pelatihan *Peace Education* menciptakan ketenangan di sekolah bertujuan untuk membantu mengurangi sikap berupa pelecehan verbal dan fisik, perkelahian, penghinaan, penyerangan, gangguan, vandalism dan cedera. Selain itu, dapat memberikan siswa rasa memiliki, meningkatkan kesadaran sosial, dan mengembangkan keterampilan kerja sama siswa.

Pendidikan sekolah ialah kegiatan yang tepat untuk menumbuhkan berbagai sikap dan karakter yang mendukung perdamaian yang selalu dirindukan oleh berbagai pihak. Pendidikan adalah upaya untuk membantu peserta didik berkembang dalam dimensi intelektual, moral dan psikologisnya. Tingginya tingkat *Bullying*/kekerasan disekolah pada 10 tahun terakhir, menjadi permasalahan yang harus segera dihapuskan, Sebagai makhluk sosial setiap manusia ingin hidup tanpa diganggu dan diganggu oleh sesuatu yang tidak diinginkannya. Sebagai mediator perdamaian, mahasiswa harus berpegang pada kenyataan bahwa internalisasi nilai-nilai perdamaian pada setiap individu dapat terjadi secara damai dan tanpa kekerasan, mereka harus selalu belajar; Perbarui diri dengan ilmu dan

keterampilan, perbarui diri dengan perkembangan situasi sekitar, dan selalu hidupkan nilai-nilai damai melalui pendidikan damai di setiap tahapannya.

Berdasarkan hal di atas, tentu peneliti sangat tertarik dalam mengembangkan model manajemen pelatihan pendidikan perdamaian berupa modul pelatihan pengurangan *bullying* di tingkat sekolah profesi (kejuruan). Pelatihan pada pendidikan perdamaian mempromosikan sikap yang membantu mencegah konflik, menyelesaikan konflik secara damai atau menciptakan kondisi sosial yang damai, pengetahuan dan keterampilan. Perdamaian adalah konsep harmoni, kebebasan dari konflik dan kebebasan dari ketakutan akan kekerasan.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Dapat disimpulkan bahwa masalah diidentifikasi sebagai berikut berdasarkan latar belakang di atas, yaitu:

1. Kasus kekerasan *bullying* terhadap siswa SMK yang marak terjadi di sekolah-sekolah.
2. Gangguan kesehatan mental timbul dari kepekaan, kemarahan berlebihan, depresi, rendah diri, kecemasan dan bunuh diri.
3. Tidak bersemangat bersekolah.
4. Berbagai kasus kenakalan remaja pernah terjadi di dunia pendidikan, misalnya tawuran dan mencontek dalam ujian (*cheating*), kekerasan anak, sampai pada kasus *bullying*.
5. Rendahnya pengawasan/kontrol sekolah dan orang tua yang rendah menyebabkan *bullying* di sekolah.

6. Belum pernah digunakan pengembangan model manajemen pelatihan *Peace Education*.

### 1.3. Batasan Masalah

Untuk menghasilkan generasi yang lebih kompeten, proses pendidikan harus ditata dan dikembangkan dengan baik di masa sekarang dan untuk masa mendatang. Penelitian ini dibatasi pada masalah Pengembangan Model manajemen pelatihan *Peace Education* untuk meminimalisir *Bullying* dikalangan siswa SMK Kabupaten Langkat.

### 1.4. Rumusan Masalah

Model pengelolaan pelatihan pendidikan *peace education* bertujuan untuk meningkatkan nilai, minat dan motivasi siswa pada mata pelajaran untuk mengurangi *bullying*. Adapun rumusan masalah penelitian ini ialah apakah pengembangan model manajemen pelatihan dengan *Peace Education* dapat meminimalisir *Bullying* bagi para murid tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

1. Bagaimana kevalidan desain model manajemen pelatihan *Peace Education* yang akan diterapkan pada siswa SMK di Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana kepraktisan penerapan model manajemen pelatihan *Peace Education* yang diterapkan pada siswa SMK di Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana keefektifan model manajemen pelatihan dengan *Peace Education* yang dapat meminimalisir *Bullying* bagi para murid tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut, yaitu:

1. Kevalidan desain model manajemen pelatihan *Peace Education* yang akan diterapkan pada siswa SMK di Kabupaten Langkat;
2. Kepraktisan penerapan model manajemen pelatihan *Peace Education* yang diterapkan pada siswa SMK di Kabupaten Langkat; dan
3. Keefektifan model manajemen pelatihan dengan *Peace Education* yang dapat meminimalisir *Bullying* bagi para murid tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

### 1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

#### 1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yaitu:

1. Sebagai sumbangan positif bahan pengembangan teori tentang *Peace Education* tentang pengembangan kompetensi dalam kajian manajemen pedagogik, khususnya manajemen *Riset and Development* dan menjadi pedoman bagi para orang tua, guru dan manajemen sekolah serta para siswa.
2. Mengintensifkan wacana dan memberikan pengetahuan dan pemikiran untuk pengembangan ilmu manajemen dalam manajemen pendidikan sebagai referensi untuk dapat membuat penelitian selanjutnya.

#### 1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dapat memberikan sumbangan positif bagi kalangan:

1. Siswa; dapat memperoleh informasi sebagai acuan bagi siswa ketika menerapkan pendidikan perdamaian untuk kehidupan sehari-hari.
2. Guru; sebagai sumber informasi sekaligus referensi dalam rangka mengantisipasi perilaku atau tindakan *bullying* / Kekerasan
3. Orang tua; sebagai kontribusi positif dan informasi tambahan dalam upaya mencegah perilaku *bullying*, kekerasan dan konflik terhadap anaknya.
4. Sekolah; sebagai bahan pembelajaran dan referensi yang dapat digunakan sekolah sebagai acuan dalam menentukan kebijakan yang terkait langsung dengan perilaku *bullying* dengan model pelatihan *peace education*.
5. Bagi Dinas Pendidikan; Mengetahui upaya sekolah dalam menangani *bullying* sehingga menjadi bahan perencanaan kebijakan dalam pendidikan di tingkat Dinas Pendidikan Langkat.